

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia memiliki tiga kekuatan pokok yang menyokong kestabilan ekonomi yaitu, sektor usaha negara, sektor swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut diharapkan dapat bekerjasama untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Koperasi sebagai salah satu pelaku bisnis dalam sistem perekonomian nasional mempunyai peran strategis, karena koperasi mempunyai fungsi utama sebagai wahana untuk menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien (Christianty, 2015).

Moonti (2016), Menurut Undang-undang RI No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada bab 1 pasal 1 bagian ke satu adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari segi ekonomi, keberadaan koperasi akan sangat membantu pemerintah dalam usaha mewujudkan perekonomian yang lebih adil. Pada umumnya koperasi sangat didukung oleh pemerintah. Putri (2018), Pada perekonomian di Indonesia sudah biasa hutang piutang untuk peningkatan usaha agar masyarakat harus berperan aktif dan berpartisipasi dalam setiap aktifitas pembangunan. Hal ini untuk mendorong perkembangan koperasi,

agar mampu menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri dan timbul dengan kuat dalam masyarakat.

Keberhasilan suatu koperasi berasal dari anggotanya, sehingga setiap anggota koperasi harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Putri (2018), khususnya dalam segi keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan maka koperasi perlu menyusun laporan keuangannya. Moonti (2016), Laporan keuangan koperasi yang umum disajikan adalah neraca dan laporan sisa hasil usaha. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan yaitu aktiva, utang dan modal koperasi pada periode tertentu. Sedangkan laporan sisa hasil usaha menggambarkan hasil-hasil usaha yang di capai koperasi dalam suatu periode operasi. Kondisi keuangan koperasi merupakan faktor utama yang menentukan layak tidaknya suatu koperasi untuk tetap beroperasi.

Putri (2018), Setiap lembaga perkreditan seperti koperasi tentunya mempunyai asset yang meliputi sumber modal dan penggunaannya. Salah satu bentuk penggunaan modal tersebut yaitu berupa piutang. Piutang adalah kekayaan perusahaan yang paling likuid setelah kas baik kas riil maupun kas di bank.

Moonti (2016), Piutang merupakan tagihan pada pihak-pihak diluar koperasi yang timbul karena terjadinya penjualan atau penyerahan jasa-jasa koperasi. Permasalahan manajemen piutang biasanya terletak pada segi kolektibilitas atas penagihannya. Piutang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap likuiditas koperasi. Karena piutang menyangkut

hubungan dengan pihak ketiga, maka pengendaliannya cenderung agak rumit. Resiko paling kecil yang sering terjadi dalam kaitannya dengan piutang adalah tidak tertagihnya piutang tersebut pada tanggal jatuh temponya. Semakin besar volume usaha koperasi biasanya transaksi penjualan barang dan jasa secara kredit akan cenderung meningkat, sehingga resiko tidak tertagihnya piutang menjadi semakin besar.

Koperasi dapat menghitung tingkat perputaran piutang dengan menggunakan rasio yang berhubungan dengan piutang yaitu rasio *receivable turn over*/ rasio tingkat perputaran piutang, rasio *average collection period*/ rasio periode rata-rata pengumpulan piutang, rasio tunggakan, dan rasio penagihan. Menurut Subramanyam dan Wild (2010), Tingkat perputaran piutang dapat dihitung dengan jumlah penjualan kredit pertahun dibagi dengan rata-rata piutang sedangkan dikoperasi perhitungan tingkat perputaran piutang diperoleh dari jumlah pinjaman yang diberikan pertahun dibagi dengan rata-rata piutang. Menurut Sudana (2011), Perhitungan rata-rata waktu yang diperlukan untuk menerima kas dapat ditentukan dengan membagi 360 hari dengan tingkat perputaran piutang (satu tahun diasumsikan 360 hari). Subramanyam dan Wild (2010), Likuiditas piutang mengacu pada kecepatan konversi piutang menjadi kas. Tingkat perputaran piutang adalah ukuran kecepatan ini.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sejahtera” merupakan koperasi yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk 16 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Koperasi ini telah ditetapkan oleh Badan Hukum

Nomor 6908/BH/II/90 pada tanggal 25 September 1996. Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sejahtera” memiliki beberapa unit usaha salah satunya yaitu unit simpan pinjam. Alasan peneliti memilih tempat ini adalah mendapat rekomendasi dari pegawai dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo sewaktu melakukan magang disana. Salah satu permasalahan yang muncul di Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sejahtera” yaitu adanya piutang yang belum tertagih meskipun sudah jatuh tempo dikarenakan peminjam tersebut mempunyai hutang di bank dan langsung dipotongkan dari gaji sehingga ada beberapa peminjam yang belum bisa membayar utang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sejahtera” dikarenakan keterbatasan gaji yang diterima hal ini berdasarkan sumber adanya 9 orang peminjam yang mengalami kredit macet. Selain itu Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sejahtera” dalam prosedur pinjaman kredit hanya dilakukan dengan mengisi blangko amrahan kredit yang diketahui oleh kepala sekolah saja yang selanjutnya diseleksi oleh pengurus. Dalam syarat peminjaman pun tidak perlu mencantumkan jaminan sehingga akan ada kemungkinan adanya piutang yang tak tertagih (Tohirin, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Putri (2018) yang berjudul tingkat perputaran piutang pada Koperasi Bumi Mangupura Sejahtera Tahun 2012-2014. Dalam penelitian ini perhitungan rasio perputaran piutang dihitung dengan menggunakan rasio *receivable turn over* dan rasio *average collection period*. Tingkat perputaran piutang pada Koperasi

Bumi Mangupura Sejahtera yaitu dari tahun 2012 ke tahun 2014 mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini berarti tingkat perputaran piutang akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan Koperasi Bumi Mangupura Sejahtera yaitu semakin tinggi perputaran piutang Koperasi Bumi Mangupura Sejahtera maka semakin baik pula dan sehat kondisi dari Koperasi Bumi Mangupura Sejahtera.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul **Analisis Tingkat Perputaran Piutang Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sejahtera” Tahun 2017-2019**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat perputaran piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sejahtera” Tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1.3.1 Tujuan penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana

tingkat perputaran piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sejahtera” Tahun 2017-2019

1.3.2 Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perputaran piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sejahtera”

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya untuk mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, serta sebagai penunjang perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

3. Bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sejahtera”

Sebagai tambahan informasi dan masukan tentang tingkat perputaran piutang